

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku Literatur

- Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2010
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. cetakan ketiga , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Atmasasmita, Ramli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Fikahati Aneska, 1996.
- Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, Jakarta, 1989
- David, Rene & John C. Broetly, *Major Legal System in the World Today*, Steven & Son, 1985
- Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021
- Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020,
- Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Worldbank, Wasinghton DC, 2009.
- Hartono, Sunarjati, , *Kapita Seleкта Perbandingan Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 1991.
- Hamzah, Adi, *Perbandingan , Hukum Pidana Beberapa Negara / Andi Hamzah*, Jakarta Sinar Grafika , 2008.
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019
- Hartono, Sunaryati, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi. Tesis, Serta Disertasi*, CV. Bandung: Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jhony Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2010
- Kuntoro Basuki, *Pengebalian Aset Korupsi dalam Perspektif Hukum Perdata*, Seminar Pengkajian Nasional (SPHN), Jakarta, 2007
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul, London, 1966.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007
- Manthovani, Reda, & R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibur, Jakarta, 2012
- Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Pidana Khusus (Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional, serta Pengembalian Aset)*, Pustaka Kemang, Depok, 2016
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Perdoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara baru, Jakarta, 1983
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Ratna Nurul Afifah, (1989I), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, catatan kuliah, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.
- Sardjono, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta, 1989,
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1993
- Utrecht.E, Hukum Pidana II, Surabaya:Pustaka Tinta Mas,1997
- Vettori, Barbara, Tough on Criminal Wakth Exploring the Practice of Proceeds From Crime Confiscation in the EU, Springer, Doordrecht, 2006
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

b) Peraturan perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Proceeds Of Crime Act (POCA) 2002, Act No. 126, 2018*

c) Jurnal Ilmiah

- Askarial, Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum, Menara Ilmu, Vol. 12, No. 79, Januari 2018
- Cassella, Stefan.D, Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Casesl , Journal of Financial Crime, , Vol 10, No (4) ,2003
- Cassella, S. D.,The case for civil forfeitureWhy in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime, Journal of Money Laundering Control, Vol. 11 No.(1), 2008
- Fitrah, Farrel Alanda, Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal

- Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia , SIGn Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, 122 - 137, 2021.
- Hafid, Irwan, Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law, Jurnal Lex Renaisans., Vol.6, No. 3, 465-480, 2021.
- Herlambang, H., Fernando, Z. J., & Rahmasari, H. Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 11 < No (2), 2022.
- I Melda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal masalah – masalah Hukum, Vol 45, No.4, 292-298, 2016.
- Irma Reisalinda Ayuningsih, Febby Mutiara Nelson, Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 ,2022
- Kennedy, Anthony, An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom, Journal of Money Laundering Control, Vol. 10, No. 1, 2007.
- Kennedy, Anthony Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators, Journal of Financial Crime , Vol.13, No. (2), 2006.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang jurnal Hukum Tora, Vol.9, No.3, 351-364, 2023.
- Mahmud, Ade, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Judisial, Vol.11 No.3, 347-366, 2018.
- Nihal Jayawikrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe, *Legal Provisions to Facilitate The Gathering Of Evidence In Corruption Cases : Easing The Burden Of Proof, Forum on Crime and Society*, Vol.2 No.1, 2002
- Putra, Diky Anandya Kharystya dan Prahassacitta, Vidya ,Tinjauan atas kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesi, Indonesia Criminal Law Review , Vol.1, No.1 , Article 4, 109-118, 2021.
- Rijali, Ahmad, Analisis data kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33, 2019
- Rambey, Guntur, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, De

ega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1, 137-161, 2017.

Saputra, R., Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130,2017.

Scott Romantz, David, Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res, 28th Suffolk University Law Review, 1994.

Sudarto, Hari Purwadi & , Hartriwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” , Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi, Vol.5 No.1, 109 -118, 2017

Tood Bernet, Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act, 40 Duquesnes Law Review Fall, Vol.40, No.1, 2001

T.Tantimin, , Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 85-102,2023

Tood Bernet, —Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Actl, 40 Duquesne Law Review Fall ,2001

Wiarti, July, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum), *UIR Law Review* , Vol.12,No. 1, 101-109,2017.

Winterton, Gerorge, Comparative Law Teaching, *The American Journal of Comparative Law*, Vol.23, No.1, 69-118, 1975

d) Laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi

Dania, Febrilia Khusna, *Relasi asas kerahasiaan bank dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang. Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

David Fredriek Albert Porajow, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara, *Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

- Jonathan Mills, Unexplained wealth legislation amendment bill 2018, Bill Digest No.27, 2018 -19, Parliamentary Library
- L Bartels, A Review of Confiscation Schemes in Australia, AIC Report Technical and background paper, Australian Institute of Criminology, 2010.
- Marcus Smith, Russel G Smith, Exploring the procedural barriers to securing unexplained wealth orders in Australia, 2016, Report to the Criminology Research Advisory Council Criminology Research Grant
- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

e) Media Online

- Alla Bayda, Proof on Balance of Probabilities, disabilitylaw.ca, <https://www.disabilitylaw.ca/about/proof-on-balance-of-probabilities>, diakses 07 Februari 2024, Pukul 22.06
- Australian Criminal Defence, “Commonwealth proceeds of crime”, online<<https://callcriminallawyers.com.au/commonwealth-proceeds-of-crime/> , diakses 21 Februari 2024,Pukul 23.00
- Corruptions perceptions index Report 2022, Transparency International , 2023, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, Diakses 22 Februari 2024, Pukul 07.00
- Christoper Catt, “Have Your Client’s Assets Suddenly (and Unexpectedly) been Frozen/ Restrained under Proceeds of Crime Act orders?” , [Catt-TIA-POCA-paper-v.20180514.pdf \(5selborne.com.au\)](#), diakses 21 Februari 2024, Pukul 09.00
- Kumalasanti Susana, “ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara BerhasilDikembalikan”,Kompas,22Mei2019,<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persenkerugian-negara-berhasil-dikembalikan>, diakses 25 Oktober 2023, Pukul 16.00
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasan Saling Bertentangan, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2> , Diakses 31 Maret 2024 pukul 23.25
- Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, Hukumonline.com, 24 Mei2017,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilegal>, diakses pada 11 Februari 2024,Pukul 23.00

Tri Jata Ayu Pramesti, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Hukum Indonesia,” Hukumonline.com, Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukumindonesia> diakses 5 januari 2024, Pukul 22.30

_____, “How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” 8 Juni 2018, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>, diakses 15 Januari 2024, Pukul 17.00

